

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji mengenai pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, antara lain:

1. Jurnal penelitian yang berjudul “*Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*” oleh P. Eko Prasetyo dan Siti Maisaroh tahun 2009, hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang Konsep pendekatan umum yang sekarang sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan warga masyarakat miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin.

Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan, dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan, sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan dalam artikel ini dimaknai sebagai kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (*power*) dan kemampuan (*kapabilitas*) yang melingkup ranah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan warga masyarakat setempat.

Inti dari penelitian yang dilakukan oleh P. Eko Prasetyo dan Siti Maisaroh di lereng pegunungan, dengan khalayak sasaran adalah warga miskin di wilayah Kecamatan Dlingo Bantul Yogyakarta ini

menunjukkan bahwa : Konsep pemberdayaan telah mengubah konsep pembangunan ekonomi dan sosial yang sekaligus mampu menjelaskan bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki potensi dasar ekonomi mikro yang produktif-kreatif karena didasari oleh sumber daya warga miskin yang kreatif.<sup>13</sup>

2. jurnal dengan judul “*Model Pemberdayaan Masyarakat*” oleh Kesi Widjajanti tahun 2011. Penelitian ini dilakukan di daerah Limbangan Kota Semarang, Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Secara sosial, masyarakat sekitar kawasan hutan lindung sampai saat ini tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang dapat diandalkan serta tidak memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan masyarakat kapitalis atau masyarakat pengusaha yang secara sosial dan politik memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang memadai. Ketidakberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi menjadi salah

---

<sup>13</sup> [jurnal.fe.unpas.ac.id/ojs/index.php/trikonomika/article/viewFile/78/77](http://jurnal.fe.unpas.ac.id/ojs/index.php/trikonomika/article/viewFile/78/77)

satu ganjalan bagi masyarakat untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan sesama saudaranya yang telah berhasil.<sup>14</sup>

Kedua penelitian ini Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan terletak pada subyek yang diteliti yaitu tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penlitian, apabila lokasi kedua penelitian di atas berada di bantul dan semarang maka penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di Kabupaten Gresik selain itu fokus penelitian juga terdapat suatu perbedaan di mana penelitian di atas lebih fokus untuk merencanakan konsep, model dan strategi pemberdayaan masyarakat yang baru, dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan sumber potensi yang ada di masyarakat. Sedangkan penelitian yang di lakukan peneliti lebih fokus kearah pemberdayaan masyarakat yang sudah ada di Kabupaten Gresik melalui salah satu perusahaan yang bernama CV Nickysae.

---

<sup>14</sup> <http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/202/189> di akses 22 oktober 2016

## B. Kerangka Konsep

### 1. Konsep pemberdayaan masyarakat

#### a. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Menurut Edi Suharto Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.<sup>15</sup>

Sedangkan Prijono & Pranarka. menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.<sup>16</sup>

Namun jika di kaji dengan pendapat Sumodiningrat pengertian tentang pemberian kekuasaan atau dalam terjemahan bahasa barat di sebut dengan istilah *empowerment* yang istilah itu benar namun kurang tepat.<sup>17</sup> Bertolak pada pendapat Prijono & Pranarka dan

---

<sup>15</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), Hal.57

<sup>16</sup> Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), Hal.77

<sup>17</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004), Hal 78-79

Soemodiningrat dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya.<sup>18</sup>

Dari berbagai macam pendapat-pendapat di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan pendekatan pembangunan dengan cara meningkatkan kemampuan , memberikan daya, membuka peluang untuk masyarakat agar dapat mengaktualisasikan diri atas apa yang dimilikinya. Penerapan model partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Yang berarti pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya.

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa

---

<sup>18</sup> Tri Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, (Yogyakarta: Aditya Media. 1998), Hal 75-76

ada yang asing dalam komunitasnya.<sup>19</sup> Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan**

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi.<sup>20</sup> Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Memberdayakan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Menanamkan nilai-nilai budaya

---

<sup>19</sup> K Suhendra, *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: alfabeta, 2006), Hal 74-75

<sup>20</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), Hal 82

modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Hal ini tentu bertujuan untuk membuka peluang-peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan pemikirannya dalam aspek pembangunan, pengembangan masyarakat merupakan salah satu metode yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada prinsip partisipasi.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama, Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

### **c. Tahap-Tahap pemberdayaan**

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap seperti yang dikemukakan oleh Ambar Teguh S.<sup>22</sup> Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

---

<sup>21</sup> Edi Suharto, *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), Hal 37

<sup>22</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), Hal 83

- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya.

#### **d. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat**

Untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan pemberdayaan dalam masyarakat tentu harus ada tolak ukur keberhasilan dalam pencapaiannya. Menurut Sumodiningrat dalam Ambar Teguh.<sup>23</sup> indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal, sebagai berikut :

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

---

<sup>23</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004), Hal.84



- 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- 3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- 4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

## **2. Konsep Kemiskinan**

### **a. Pengertian kemiskinan**

Kemiskinan adalah masalah sosial yang bersifat global, hampir setiap negara di dunia tidak luput dengan adanya kemiskinan. Di Indonesia sendiri kajian mengenai kemiskinan sudah banyak di perbincangkan oleh beberapa ahli, mulai dari sebab-akibat timbulnya kemiskinan hingga bagaimana cara untuk menanggulangnya.

Sedangkan menurut Parsudi Suparlan kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat

kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.<sup>24</sup>

Penyebabnya yang multidimensi menjadi dampak akan sulitnya untuk mengatasi masalah tentang kemiskinan, kemiskinan sendiri merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus di kembangkan untuk menyibak tirai dan “misteri” kemiskinan ini. Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional. SMERU, misalnya, menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri :<sup>25</sup>

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan,sandang,papan)
- 2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)

---

<sup>24</sup> Parsudi Suparlan, *kemiskinan di perkotaan: bacaan untuk antropologi perkotaan*. Jakarta: sinar harapan dan yayasan obor Indonesia, 1984), Hal 12

<sup>25</sup> Edi Suharto, *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005), Hal 131-132

- 3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- 4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal
- 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam
- 6) Ketidakterlibatan dalam kegiatan social masyarakat.
- 7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- 8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- 9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)

Berdasarkan pengertian dan konsepsi kemiskinan di atas yang bersifat multidimensional kiranya lebih tepat jika di gunakan sebagai pedoman analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan strategi yang tepat dalam penangananya.

#### **b. Penyebab Kemiskinan**

Menurut Edi Suharto Kemiskinan merupakan masalah yang tak pernah kunjung usai. Di negara-negara maju, kemiskinan lebih bersifat individual, yaitu disebabkan karena seseorang mengalami kecacatan (fisik atau mental), ketuaan, sakit yang parah, dan sebagainya. Namun, pada negara berkembang, kemiskinan lebih

disebabkan pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Di Indonesia, penyebab utama dari kemiskinan adalah karena adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan rakyat, sehingga rakyat tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan karena seseorang tersebut memiliki pendidikan yang rendah, malas bekerja, tidak memiliki modal atau keterampilan yang memadai, terbatasnya lapangan pekerjaan, terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), beban keluarga yang tinggi, tidak adanya jaminan sosial, serta hidup terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas.

Di bawah ini akan peneliti jelaskan empat faktor penyebab kemiskinan yang di bahas secara konseptual, menurut Edi Suharto, antara lain:<sup>27</sup>

#### 1) Faktor Individual

Terkait dengan kondisi fisik dan psikologis seseorang.

Orang menjadi miskin karena disebabkan oleh perilaku, pilihan,

---

<sup>26</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), Hal 17

<sup>27</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), Hal 17-18

atau kemampuan dari orang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

## 2) Faktor Sosial

Terkait dengan kondisi lingkungan sosial yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Seperti, diskriminasi berdasarkan usia, gender, dan etnis.

## 3) Faktor Kultural

Terkait dengan kondisi budaya yang menyebabkan kemiskinan, yaitu kebiasaan hidup.

## 4) Faktor Struktural

Terkait dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif, dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

### c. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Secara garis besar, kemiskinan dikelompokkan menurut sebab dan jenisnya.

1) Menurut sebabnya (asal mula) kemiskinan dibagi menjadi tiga macam yaitu Kemiskinan Natural, Kemiskinan Kultural, dan Kemiskinan Struktural.

a) Kemiskinan Natural atau yang disebut juga dengan kemiskinan alamiah adalah keadaan miskin karena pada awalnya memang sudah miskin. Biasanya daerah yang mengalami kemiskinan natural adalah daerah-daerah yang terisolir, jauh dari sumber daya-sumber daya yang ada.

Sehingga perkembangan teknologi yang ada berjalan sangat lambat. Contoh masyarakat yang mengalami kemiskinan natural adalah masyarakat yang tinggal di puncak-puncak gunung yang jauh dari pemukiman warga. Sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan.

- b) Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau kelompok masyarakat sehingga membuatnya tetap melekat pada kemiskinan. Berikut penuturan Kartasmita dalam ninik sudarwati mengenai kemiskinan kultural: Kemiskinan kultural ini mengacu pada sikap hidup seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Selain itu kemiskinan kultural ini terjadi karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros, dan lainnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: Intimedia, 2009), Hal 25-26

- c) Sedangkan Kemiskinan Struktural menurut Edi Suharto adalah kemiskinan yang terjadi bukan dikarenakan ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.<sup>29</sup>
- 2) Menurut jenisnya, kemiskinan juga dibagi menjadi dua yaitu Kemiskinan Relatif dan Kemiskinan Absolut.<sup>30</sup>
- a) Kemiskinan Relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan yang lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada suatu daerah tertentu bisa jadi yang termiskin di daerah lainnya.
- b) Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan yang diderita seseorang atau keluarga apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan serta pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Dalam hal ini yang membedakan antara kemiskinan absolut dan relatif yaitu terletak pada standar penilaiannya. Jika

---

<sup>29</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal 21

<sup>30</sup> Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: Intimedia, 2009), Hal 25

kemiskinan relatif, standar penilaiannya ditentukan secara subyektif oleh masyarakat setempat. Sedangkan untuk standar penilaian kemiskinan absolut ditentukan dari kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun *non* makanan (garis kemiskinan).

### 3. Konsep Pengangguran

#### a. Pengertian Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut *Mankiw N. Gregory* dalam terjemahan: Fitria Liza, Imam Nurmawan. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hal 8

<sup>32</sup> N. Gregory Mankiw, *Makro Ekonomi. Terjemahan: Fitria Liza, Imam Nurmawan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), Hal 150



Tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya.<sup>33</sup>

#### **b. Penyebab Pengangguran**

Menurut Sadono Sukirno penyebab terjadinya pengangguran di bagi menjadi tiga yaitu :<sup>34</sup>

##### **1) Pengangguran Friksional**

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

##### **2) Pengangguran Struktural**

Pengangguran struktural terjadi karena ada problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur

---

<sup>33</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hal 472

<sup>34</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hal 8-9

yang demikian memerlukan perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut.

### 3) Pengangguran Konjungtur

pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

## c. Ciri-ciri Pengangguran

Sadono Sukirno mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi menjadi empat kelompok :<sup>35</sup>

### 1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja.

Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi

---

<sup>35</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hal 10-11

penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

## 2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

## 3) Setengah Menganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

## 4) Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabial dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

#### 4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip Partisipasi, Kesetaraan, Keswadayaan atau Kemandirian dan Berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

##### a. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

##### b. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

---

<sup>36</sup> Sri Najiyati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International – 1P, 2005), hal. 54

c. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.